

Strategi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah

Yamaica Nur Amalia¹, Wahyu Tri Widayanti²

INTISARI

Kelembagaan yang kuat akan membentuk kapasitas dan keahlian sumber daya manusia yang tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kelompok Tani Hutan Rimba Agro Abadi, *stakeholders* dan perannya dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, dan strategi pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan pemegang IPHPS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion*, dan studi dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Data dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman untuk identifikasi kelembagaan, analisis *stakeholder* untuk identifikasi peran *stakeholders*, dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan KTH Rimba Agro Abadi yaitu: legalitas kelembagaan berupa Keputusan Kepala Desa Mendelem; struktur pengurus yang dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas; peraturan internal berupa AD/ART; pemimpin yang demokratis; dan program kerja yang didasarkan pada RKPS dan RKT. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan PS yaitu, *stakeholder* primer (KTH Rimba Agro Abadi sebagai sebuah KTH pemegang IPHPS, dan Petani pemegang IPHPS sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan sumber daya hutan), *stakeholder* kunci (CDK V Jawa Tengah berperan memfasilitasi proses peningkatan kapasitas KTH), dan *stakeholder* sekunder (Pemerintah Desa memberikan legalitas kelompok, dan LSM GEMA PS Indonesia memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial). Strategi pengembangan kelembagaan diprioritaskan melalui optimalisasi pelaksanaan rencana kerja dan meningkatkan kerja sama dengan *stakeholders* guna peningkatan kapasitas kelembagaan dan memperluas jejaring pasar.

Kata kunci : analisis kelembagaan, Perhutanan Sosial, strategi pengembangan, *stakeholder*

¹ Mahasiswa Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

THE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT STRATEGY ON FOREST FARMER GROUP OF SOCIAL FORESTRY SCHEME HOLDERS IN BELIK DISTRICT PEMALANG REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE

Yamaica Nur Amalia³, Wahyu Tri Widayanti⁴

ABSTRACT

Strong institutions will form a capacity and expertise of high human resources. This research aims to determine the institutional in Social Forestry management in the Rimba Agro Abadi Farmers Group, stakeholders and their role in managing Social Forestry, and the strategy for institutional development of forest farmer groups as the holder of IPHPS.

This research uses a qualitative approach with a case study method. The data used include primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, in-depth interviews, Focus Group Discussion, and documentation studies by determining the informants using snowball sampling technique. Data were analyzed using the Miles and Huberman analysis model to identify institutional, stakeholder analysis to identify stakeholder roles, and SWOT analysis to formulate institutional development strategies.

The results of this study showed that the institutional of KTH Rimba Agro Abadi is: institutional legality in the form of a Mendelem Village Head Decree; management structure equipped with a clear division of tasks; internal regulations in the form of AD/ART; democratic leader; and work programs based on the RKPS and RKT. Involved stakeholders in the management of PS are, primary stakeholders (KTH Rimba Agro Abadi as a KTH IPHPS holder, and IPHPS holder farmers as the executor of forest resource management activities), key stakeholders (CDK V Central Java has a role in facilitating the process of increasing KTH capacity), and secondary stakeholders (Village Government provides group legality, and NGO GEMA PS Indonesia aids in the implementation of Social Forestry). The institutional development strategy is prioritized through optimizing the implementation of work plans and increasing cooperation with stakeholders to increase institutional capacity and expand market networks.

Keywords: institutional analysis, Social Forestry, development strategy, stakeholder

³ A student of Forest Management Department, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University

⁴ A lecturer of Forest Management Department, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University